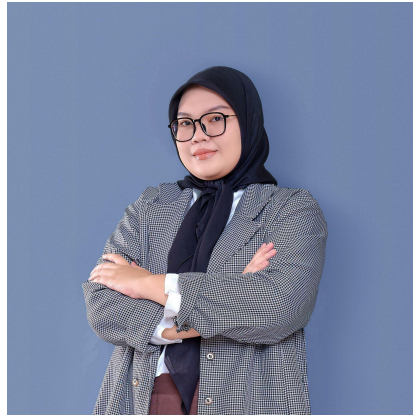


Gladys Nadya, S.Sos.

Email: gladys@ijrs.or.id

LinkedIn: [Gladys Nadya](#)



Profil Singkat

Gladys Nadya adalah lulusan Kriminologi dari Universitas Indonesia. Selain berperan sebagai Peneliti di Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dalam mengembangkan dan melaksanakan penelitian tentang akses keadilan, hak asasi manusia, dan isu GEDSI, Gladys juga aktif sebagai spesialis peneliti sosial untuk pengembangan indeks dan penelitian kuantitatif dengan mengasistansi Kementerian/Lembaga seperti Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Jabatan Saat Ini

Peneliti

Pendidikan

- S1 Kriminologi di Universitas Indonesia

Pengalaman Kerja

- **Kegiatan Penelitian**

1. Tim Penyusunan Indeks HAM di Indonesia Tahun 2025 pada Kementerian HAM (2025)
2. Asisten Peneliti di Lembaga Demografi Universitas Indonesia untuk Indeks Hak Asasi Manusia di Indonesia (2024)
3. Peneliti di Indonesia Judicial Research Society (IJRS) (2021 - sekarang)
4. Asisten Peneliti untuk Proyek Penelitian oleh Dosen di Forschen U. Indonesia (FUI) Universitas Indonesia (2021)
5. Magang Advokasi dan Asisten Peneliti di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) (2020 - 2021)

6. Peneliti untuk Penelitian Biaya Kejahatan dalam Tindak Pidana Narkotika, didukung oleh AIPJ2 pada tahun 2024
 7. Peneliti untuk Studi tentang Perubahan Anggaran Bantuan Hukum, didukung oleh The Asia Foundation (TAF) pada tahun 2023
 8. Peneliti untuk Membantu Penyusunan Pedoman Kejaksaan No. 2 Tahun 2023 tentang Fasilitas yang Tepat dan Penanganan Kasus yang Aksesibel untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, didukung oleh AIPJ2 antara 2022 - 2023
 9. Peneliti untuk Penelitian Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan pada tahun 2022, didukung oleh Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) pada tahun 2022
 10. Peneliti untuk Pemantauan dan Evaluasi SDGs 16.3 di Indonesia, didukung oleh ALG Network pada tahun 2022
 11. Peneliti untuk Formulasi Indeks Akses ke Keadilan dan Indeks Pembangunan Hukum pada tahun 2021, didukung oleh AIPJ2 antara 2021 - 2022
 12. Peneliti untuk Penelitian mengenai Perbedaan Hukuman dan Kebijakan Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia (2021 - 2022)
 13. Peneliti untuk Penelitian mengenai Penilaian Fasilitas yang Tepat bagi Penyandang Disabilitas, didukung oleh AIPJ2 antara 2021 - 2022
 14. Peneliti untuk Formulasi Indeks Pembangunan Hukum pada tahun 2022, didukung oleh AIPJ2 pada tahun 2023
 15. Petugas Proyek untuk Pemberdayaan Hukum bagi Warga Desa, didukung oleh Legal Empowerment Funds (LEF) antara 2023 - 2025
 16. Manajer Proyek untuk Pemantauan dan Evaluasi Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021, PERMA No. 3 Tahun 2017, dan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Kebijakan yang Berkaitan dengan Perempuan dan Anak yang Menghadapi Masalah Hukum, didukung oleh AIPJ2 antara 2023 - 2024
 17. Manajer Proyek untuk Pelatihan Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum yang Berkaitan dengan Kelompok Rentan yang Menghadapi Masalah Hukum, didukung oleh Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) pada tahun 2023
 18. Manajer Proyek untuk Pengembangan Alat Pemantauan dan Evaluasi Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021, PERMA No. 3 Tahun 2017, dan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Kebijakan yang Berkaitan dengan Perempuan dan Anak yang Menghadapi Masalah Hukum, didukung oleh AIPJ2 antara 2022 - 2023
 19. Peneliti untuk Kampanye Bersama dan Publikasi Portal Data, didukung oleh AIPJ2 pada tahun 2022 - 2024
 20. Peneliti Pengolahan Data untuk Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Pedoman Pidana untuk Kasus Narkotika (2022 - 2023)
- **Kegiatan Konsultan/Tenaga Ahli**
 1. Konsultan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2023 - 2024)
 2. Tenaga Ahli Webscraping Data Penyusunan Indeks Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 2025 pada Kementerian HAM (2025)

3. Tim Tenaga Ahli Penyusunan Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Permenkumham No. 16 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan HAM dalam Pembentukan PUU pada Kementerian HAM (2025)

Hasil Publikasi

Buku

1. _____. (2026). Serial Infografis: Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2024. Jakarta: IJRS
2. _____. (2026). Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2024. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum.
3. Gladys Nadya Arianto, dkk. (2026). Policy Paper: Kelembagaan Pengelolaan Dana Abadi untuk Pemulihan Korban Tindak Pidana. Jakarta: IJRS.
4. Gladys Nadya Arianto, dkk. (2025). Refleksi Pembangunan Hukum Indonesia dalam Data: Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka. Jakarta: IJRS.
5. Gladys Nadya Arianto, dkk. (2025). Infographic Booklet of Research on Impacts and Costs of Handling Narcotics Crime in Indonesia. Jakarta: IJRS.
6. Gladys Nadya Arianto, dkk. (2025). Dampak dan Biaya Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. Jakarta: IJRS.
7. Gladys Nadya Arianto, dkk. (2025). Pemantauan dan Evaluasi Terkait Kebijakan Penanganan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Peradilan. Jakarta: IJRS
8. _____. (2025). Pemberdayaan Hukum: Penguatan Akses Publik terhadap Keadilan. Jakarta: IJRS
9. _____. (2025). Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2023. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas
10. Gladys Nadya Arianto, dkk. (2024). Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum yang Berkaitan dengan Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum. Jakarta: IJRS
11. _____. (2024). Kebutuhan Anggaran Bantuan Hukum yang Berperspektif Kelompok Rentan. Jakarta: IJRS.
12. _____. (2024). Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2022. Jakarta: UI Publishing
13. _____. (2023). Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2021. Jakarta: UI Publishing

14. _____. (2023). Indeks Akses Terhadap Keadilan (A2J) Tahun 2021. Jakarta: UI Publishing
15. _____. (2023). Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum. Jakarta: IJRS
16. _____. (2022). Laporan Penelitian Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan Tahun 2022. Jakarta: IJRS
17. _____. (2022). Penelitian Disparitas Pemidanaan dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. Jakarta: IJRS
18. _____. (2022). Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia Tahun 2021. Jakarta: IJRS
19. _____. (2022). Booklet Penelitian Disparitas Pemidanaan dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. Jakarta: IJRS

Tulisan di Media

1. Bestha Inatsan Ashila and Gladys Nadya. (2021). Hambatan Orang dengan HIV AIDS saat Mengalami Masalah Legal Pentingnya Peran Pendamping Hukum dan Non Hukum. <https://theconversation.com/hambatan-orang-dengan-hiv-aids-saat-mengalami-masalah-legal-pentingnya-peran-pendamping-hukum-dan-non-hukum-172865>
2. Dio Ashar Wicaksana, Gladys Nadya, and Putri Kusuma Amanda. (2024). Rapor Merah Reformasi Hukum Peradilan Pidana Jokowi PR untuk Prabowo. <https://theconversation.com/rapor-merah-reformasi-hukum-peradilan-pidana-jokowi-pr-untuk-prabowo-237488>
3. Marsha Maharani, Arsa Ilmi Budiarti, Bunga Pertiwi Tontowi Puteri, and Gladys Nadya. Community-Based Paralegals for Access to Justice in Indonesia: A Strategic Enhancement. *Journal of Contemporary Sociological Issues*, Vol. 4 No. 2. 2024. <https://doi.org/10.19184/csi.v4i2.45781>
4. Gladys Nadya Arianto. (2026). Child Grooming: Kejahatan Berbasis Relasi Kuasa yang Membahayakan Anak. <https://theconversation.com/child-grooming-kejahatan-berbasis-relasi-kuasa-yang-membahayakan-anak-274216>

Pencapaian

1. Pembicara untuk Talk Show Open Government Week 2023 dengan tema “Keterbukaan Pemerintah yang Bermakna bagi Perempuan dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendorong Akses terhadap Keadilan di Indonesia”
2. Pembicara untuk Peluncuran Indeks Pembangunan Hukum Indonesia dan Indeks Akses ke Keadilan pada tahun 2021
3. Pembicara untuk Peluncuran Indeks Pembangunan Hukum Indonesia 2022
4. Moderator untuk Diseminasi Hasil Penelitian tentang Reformasi Hukum Acara Pidana bagi Penyandang Disabilitas yang Menghadapi Masalah Hukum, yang diselenggarakan oleh IJRS dan Rutgers Indonesia

5. Pembicara untuk Workshop tentang Alat Pemantauan Bersama untuk Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017: Mewujudkan Pengadilan Inklusif bagi Perempuan di Semarang, yang diselenggarakan oleh LBH Semarang dan LBH Padang
6. Anggota Tim Peneliti untuk Asesmen Kebijakan Anggaran Bantuan Hukum yang Berperspektif Kelompok Rentan di Indonesia (Pembentukan Tim Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.158-HN.04.03 Tahun 2023)
7. Pembicara Talk Show Open Government Week 2024 dengan tema "Enabling Open Government for All"
8. Moderator Workshop RUU Bantuan Hukum yang diadakan oleh Asosiasi LBH APIK Indonesia
9. Pembicara High-Level Forum on MultiStakeholder Partnership (HLF MSP) 2024 – Side Event on "Innovative Budgeting for Justice: The Comprehensive Cost of Crime Approach"
10. Pembicara Pemapar Diseminasi Hasil Monev Perma 3 2017 dan Perma 5 2019 di Kick Off Meeting Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung
11. Narasumber di Launching Riset Kawin Anak Koalisi 18+ dan Wahana Visi Indonesia
12. Moderator di Refleksi 5 Tahun IJRS Inaugurasi IJRS
13. Peserta pada Regional Conference on "Achieving Just Societies: Inclusive Justice Pathways for People and Planet in Asia and the Pacific" - United Nations Conference Centre in Bangkok, Thailand.
14. Peserta pada International Conference on Drugs Research and Policy 2024 - Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta
15. Moderator Workshop Komisi Yudisial terkait Pemantauan Persidangan
16. Panitia Sharing Session IJRS x Utrecht University
17. Pemapar pada Australasian Aid Conference 2025
18. Narasumber pada Sekolah Riset Difabel SAPDA Jogja terkait Penelitian Kuantitatif
19. Narasumber pada Internalisasi Indeks Pembangunan Hukum di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
20. Narasumber untuk Data Country Study OECD dan Kementerian PPN/Bappenas
21. Dosen Tamu di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa terkait Cost of Justice
22. Asistensi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH)
23. Asistensi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam Pengawasan Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH)
24. Asistensi Penguatan Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Budaya Hukum dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan